

RI Sukses Turunkan Deforestasi Norwegia Penuhi Janji

INDONESIA dan Norwegia telah menyepakati aturan main pembayaran pengurangan emisi berbasis hasil (*result-based payment*) atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Adapun jumlah pengurangan emisi yang akan dibayar sekitar 4,8 juta ton CO₂e, hasil dari penurunan emisi periode 2016-2017. Itu akan menjadi pembayaran perdana yang diterima Indonesia berkat upaya pengurangan emisi.

"Selama empat tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi melakukan berbagai upaya ko-rektif di sektor kehutanan dan lahan. Langkah serius pemerintah sudah menunjukkan hasil signifikan pengurangan emisi," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta, Sabtu (16/2).

Kedua negara menyepakati kerja sama pendanaan iklim me-

lalui komitmen nota kesepakatan pada 2010 lalu. Dukungan dana yang dijanjikan Norwegia hingga US\$1 miliar.

Sejauh ini, terang Siti, baru sekitar 13% dana dialirkan yang digunakan untuk mendukung langkah Indonesia mengatasi deforestasi dari sisi teknis dan pembangunan kapasitas. Sisanya dana akan diberikan untuk membayar hasil pengurangan emisi.

"Jadi nanti dana tersebut juga bisa dinikmati masyarakat karena yang melakukan pengendalian perubahan iklim juga masyarakat," jelas Siti didampingi Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen yang tengah melakukan kunjungan ke Indonesia.

Menteri Ola mengapresiasi Indonesia yang dinilai serius mengatasi perubahan iklim di sektor kehutanan dan lahan. Itu terbukti melalui kebijakan yang diterbitkan. Kebijakan tersebut

antara lain moratorium hutan primer dan lahan gambut, moratorium izin baru perkebunan sawit, perbaikan tata kelola kehutanan, dan penegakan hukum lingkungan.

"Kami senang upaya Indonesia mengurangi emisi telah menuai hasil. Jika deforestasi Indonesia terus menurun, kami siap untuk meningkatkan pembayaran dana," ujarnya.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, menjelaskan pembayaran kompensasi Norwegia dilakukan melalui badan layanan umum (BLU) bernama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Jumlah pengurangan emisi yang disepakati itu nantinya akan diverifikasi pihak independen. Lalu kita bersama Norwegia akan tentukan nilai karbonnya jika diuangkan," jelas Ruandha. (Dhk/H-3)